

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN GANTI RUGI
KECELAKAAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
DARI KABUPATEN MALANG YANG MENJADI PEKERJA
KONSTRUKSI DI MALAYSIA**

**(Studi Pelaksanaan Pasal 77-84 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YAN ERICK PARULIAN SIHOMBING

NIM. 0710113236



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI KABUPATEN MALANG YANG MENJADI PEKERJA KONSTRUKSI DI MALAYSIA (Studi Pelaksanaan Pasal 77-84 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri)

Identitas Penulis:

a. Nama : Yan Erick P. Sihombing

b. NIM : 0710113236

Konsentrasi : Hukum Perburuhan

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal: 9Juli 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Umu Hilmy, S.H. M.S.
NIP. 19490712 198403 2 001

Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si.
NIP. 19620805 19880 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah SH., MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN GANTI RUGI KECELAKAAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI KABUPATEN MALANG YANG MENJADI PEKERJA KONSTRUKSI DI MALAYSIA

ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang bekerja sebagai pekerja konstruksi yang hak-haknya tidak dipenuhi ketika mengalami kecelakaan kerja, walaupun peraturan di Indonesia maupun di Malaysia telah menjamin akan dipenuhinya kerugian mereka melalui asuransi. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum itu terdapat pada proses pemberangkatan mereka yang hampir setengahnya berangkat tanpa menggunakan dokumen atau illegal, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja maka nasib pekerja tersebut tergantung pada “kebaikan” majikannya, kalau majikannya “baik” maka mereka diuruskan dokumen dan diasuransikan atau diberikan biaya pemulihan, tapi sebaliknya kalau mereka “tidak baik”, maka pekerja tersebut akan ditelantarkan, sehingga yang menolong adalah teman-teman sesama pekerja konstruksi dari daerah asal yang sama. Tidak demikian dengan Tenaga Kerja Indonesia yang berdokumen, majikan akan mengasuransikan mereka karena jika tidak melakukan hal tersebut dan dilaporkan, maka majikan itu akan terkena sanksi. Upaya untuk mengatasi kendala oleh Disnakertrans di Kabupaten Malang telah dilakukan dengan mensosialisasikan pemberangkatan dengan menggunakan dokumen, tapi kesulitannya adalah luasnya wilayah Kabupaten Malang yang menyebabkan pengawasan keberangkatan TKI yang melalui kabupaten atau kota lain tidak mudah untuk dilakukan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Ganti Rugi, Kecelakaan Kerja, Pekerja Konstruksi.

ABSTRACT

Effected by the number of Indonesian migrant workers in Malaysia who worked as a construction worker that his rights were not fulfilled when experienced a work accident, although regulations in Indonesia and Malaysia has guaranteed will fill their losses through insurance. Constraints in the implementation of legal protection is almost half of the workforce that leaves the country were undocumented or illegal, so when the accident occurred it is depending on “the kindness” of his employer, if the employer is “decent or kind” they will take care of their documents and be insured or given fee for recovery, however in contrast if the employer is “not kind” then the worker will be abandoned, so the help will came from friends who come from the same region as the worker who had the accident. Unlike the worker who use documents, the employer shall insure the workforce, because if the employer did not do so then the employer will be hit by sanctions. The efforts made by the Department of labor of Malang Regency to overcome the barriers is socialize the departure by using the document, yet the difficulty is the vast area of Malang Regency that make it hard to conduct surveillance when there is departure from the city or other areas.

Keywords: Legal protection, Indonesian Labor, Work Accident, Contruction Worker.

I. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemenuhan hak Tenaga Kerja Indonesia ketika mengalami kecelakaan kerja di luar negeri tidak diatur secara rinci, namun hanya dikemukakan secara umum yaitu pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri:

- “(1) Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
- a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinegara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturanperundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pembelaan dan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) tersebut tidak mudah dilaksanakan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja menjadi pekerja konstruksi di Malaysia yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon teori ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalm teori perlindungan hukum preventif maksudnya rakyat atau dalam penelitian ini TKI diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, lebih lanjut lagi TKI diberikan kesempatan untuk menuntut hak-hak mereka yang seharusnya sebagai pekerja dan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif, maksudnya adalah kepada tindakan penyelesaian apabila sudah terjadi permasalahan atau sengketa. Jadi seharusnya apabila TKI sudah mengalami masalah dalam hal hak-haknya tidak dipenuhi, maka harus ada penyelesaian hingga tuntas sehingga hak tersebut pada akhirnya bisa dipenuhi atau ada ganti rugi terhadap tidak dipenuhinya hak TKI tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah sekarang hanya melaksanakan perlindungan dalam bentuk represif, karena undang-undang yang

merupakan wujud dari pemberian perlindungan hukum secara preventif masih belum optimal.

Bekerja di luar negeri, merupakan salah satu jalan keluar dari suatu masalah pengangguran di Indonesia. Pemerintah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, di berbagai bidang pekerjaan, dan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi. Negara Malaysia merupakan negara yang sedang mengembangkan berbagai sarana maupun prasarana yang membutuhkan banyak pekerja konstruksi untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunannya. Dalam membangun bangunan, terutama yang berskala besar, kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan akan ada bagi para pekerja yang mengerjakannya. Risiko tersebut adalah kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan luka, cacat permanen dan bahkan mungkin menyebabkan kematian. Dengan kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan kerja seperti itu jelas harus ada jaminan bagi pekerjanya agar merasa sejahtera dan aman dalam melakukan pekerjaannya, terutama apabila kecelakaan itu terjadi padanya. Menanggapi hal ini Pemerintah Malaysia dengan menggunakan *Employment Act 1955* mengatur tentang hal-hal yang menjadi jaminan bagi tenaga kerja mengenai ganti rugi kecelakaan kerja bagi pekerja asing. Pelaksana jaminan ini adalah majikan dengan wujud membayarkan biaya asuransi bagi pekerja asing dan membayar kompensasi apabila terjadi kecelakaan kerja.

“According to Subsection 26 (1) of Workmen’s Compensation Act 1952, all employers of foreign workers must ensure that the workers are insured with the panel insurance company appointed under the Foreign Workers’ Compensation Scheme by the Human Resources Minister.”

“The Subsection 26 (1) of Workmen’s Compensation Act 1952 also states that failure to do so is an offence. If convicted, the employer will be fined not more than RM20,000, or jailed for not more than two years or both.”

“Menurut Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Kompensasi Pekerja Tahun 1952, semua majikan pekerja asing harus memastikan bahwa para pekerja yang diasuransikan dengan perusahaan asuransi panel yang ditetapkan di bawah skema kompensasi pekerja asing oleh Menteri Sumber Daya Manusia.”

“Pasal 26 Ayat (1) dari Undang-undang Kompensasi Pekerja Tahun 1952 juga menyatakan bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan hal itu merupakan suatu pelanggaran. Jika dinyatakan bersalah, majikan akan dikenakan denda maksimal RM 20,000, atau dipenjarakan selama tidak lebih dari dua tahun atau keduanya.”

Namun meskipun sudah ada jelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi kecelakaan kerja, prakteknya sering tidak memenuhi hak-hak tenaga kerja asing di Malaysia, terutama pada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi. Hal ini mengharuskan Pemerintah Indonesia lebih aktif dalam mengawasi jalannya pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia.

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut permasalahan dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Malang yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Malang yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja Indonesia dari Kabupaten Malang yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena mengkaji berbagai kenyataan dalam pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang yang bekerja di bidang konstruksi di Malaysia ketika terjadi kecelakaan kerja.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman para mantan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi yang pernah mengalami kecelakaan kerja (dua orang) dan mantan Tenaga Kerja Indonesia yang menyaksikan temannya mengalami kecelakaan kerja (lima orang) dalam pemenuhan hak-haknya atas ganti rugi. Sedangkan data sekundernya adalah dokumen dari para mantan Tenaga Kerja Indonesia yang terkait yaitu: KTKLN, pasport, visa kerja, kwitansi rumah sakit. Untuk mendapatkan data primer, wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan dan data sekunder didapat dengan mengkopir dokumen-dokumen tersebut.

Hasil wawancara dan studi dokumen diuraikan dan dihubungkan secara sistematis sehingga dapat dikaji dalam menjawab permasalahan dalam artikel ini tentang pelaksanaan perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Malang yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia, beserta kendala dan upaya mengatasi kendala tersebut. *Content analysis* (analisis isi) digunakan untuk mengkaji data primer hasil wawancara bebas. Kata-kata kunci penting dari hasil wawancara tersebut antara lain: kecelakaan kerja, ganti rugi, biaya rumah sakit, majikan, digunakan untuk mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Sedangkan studi dokumen terhadap data sekunder digunakan untuk me- *recheck* data primernya

IV. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Indonesia merupakan negara terbesar kedua setelah Filipina sebagai negara terbanyak pengirim tenaga kerja ke luar negeri (Dhini Rama Dhanika, Staf Pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Bias Gender dan Segregasi Vertikal Pada Produktivitas Wanita di Dunia Kerja, Mawas, Desember 2010, hlm. 1). Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2012 angka

pengiriman TKI ke Malaysia mencapai 48.000 orang, sedangkan menurut data yang di kutip dari Deputy Perlindungan BNP2TKI Lisna Y. Poeloengan jumlah TKI yang ada di Malaysia sampai dengan Juli 2012 mencapai hampir 1,9 juta orang¹. Dari jumlah tersebut, TKI yang berasal dari Kabupaten Malang yang di berangkatkan ke luar negeri pada tahun 2012 adalah 4.635 orang. Dari sekian banyak tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri, khususnya di Malaysia, mereka bekerja di berbagai sektor lapangan kerja, seperti menjadi teknisi di pabrik, mandor, baby sitter, pembantu rumah tangga, sopir, tukang bangunan, buruh perkebunan, dll.

Tukang bangunan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dipilih oleh tenaga kerja dari Indonesia. Tukang bangunan merupakan pekerjaan yang artinya sudah sesuai dengan sebutannya, yaitu mereka bekerja di sektor konstruksi untuk membangun suatu bangunan, misalnya perumahan, pabrik, jalan raya, jembatan, dll. Pekerjaan tersebut dipilih karena memiliki upah yang cukup besar dibandingkan dengan upah sebagai tukang bangunan di Indonesia. Ada kebijakan yang menetapkan gaji TKI yang bekerja di Malaysia minimal sebesar 700 RM dan dibayarkan melalui jasa perbankan, 700 RM setara dengan Rp2,1 juta². Maka hal tersebut sudah cukup menarik perhatian pekerja dari Indonesia untuk mencari pekerjaan di bidang tersebut.

Dengan tawaran yang begitu menarik seringkali membuat calon TKI menjadi “buta”, maksudnya mereka tidak memikirkan bagaimana cara dengan mengikutii prosedur yang benar untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia, akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang ilegal untuk bisa bekerja disana. Hal ini menunjukkan bahwa berangkat dengan cara ilegal akan membuat TKI tidak memiliki dokumen-dokumen yang bisa menjadi jaminan TKI tersebut apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja. Kesadaran akan hal ini masih sangast kurang di pihak TKI, selain itu mereka menghadapi kondisi bahwa mereka tidak memiliki posisi tawar yang

¹ Tenaga Kerja Indonesia Paling Banyak Tersebar Di Malaysia, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2012/09/26/170223/2038424/4/tenaga-kerja-indonesia-paling-banyak-tersebar-di-malaysia> pada tanggal 1 November 2012

² <http://www.jpnn.com>, Upah Terendah TKI di Malaysia Rp.2,1 juta. Diakses pada tanggal 17 November 2012

bagus bila dibandingkan dengan pekerja dari negara lainnya yang semakin menjadikan TKI tertekan di Malaysia. Kurangnya pengawasan dan penanganan secara efektif dari Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia juga menjadi salah satu penyebab hak-hak para TKI tidak dapat dipenuhi secara optimal.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi dalam 2 bentuk teori perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif yang maksudnya rakyat atau dalam penelitian ini TKI diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, lebih lanjut lagi TKI diberikan kesempatan untuk menuntut hak-hak mereka yang seharusnya sebagai pekerja dan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif, maksudnya adalah kepada tindakan penyelesaian sengketa³, lebih lanjut apabila TKI sudah mengalami masalah dalam hal hak-haknya tidak dipenuhi, maka harus ada penyelesaian hingga tuntas sehingga hak tersebut pada akhirnya bisa dipenuhi atau ada ganti rugi terhadap tidak dipenuhinya hak TKI tersebut.

Berbicara mengenai perlindungan hukum dalam penelitian ini berarti membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemenuhan hak bekerja, karena pada saat ditempatkan di luar negeri dan mengingat lokasi mereka bekerja jauh dari sanak keluarga dan merupakan tempat yang baru, berbeda bahasa dan suasana dari Indonesia tempat asal mereka, maka akan sulit bagi TKI untuk bisa mencari informasi dan bertindak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Sekalipun sudah dipenuhi dengan pembekalan pada masa pra

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, hlm. 2

penempatan, bukan jaminan bagi TKI untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Arti kata pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Dalam melaksanakan suatu rancangan pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai agar menjadi sesuatu hal yang baru yang memberikan suatu dampak dari adanya rancangan atau keputusan tersebut dilaksanakan. Demikian juga dengan kata penerapan yang memiliki arti yang hampir sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan artinya proses, cara, perbuatan menerapkan. Suatu keputusan atau rancangan yang telah dirancang oleh sekelompok orang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya dan juga diterapkan demi mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekelompok orang tadi. Dalam istilah lain penerapan sama dengan implementasi. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁴

Dalam ilmu politik bila dikaitkan dengan ilmu hukum dikatakan bahwa negara sebagai lembaga atau instituta dan dianggap sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia (Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 35). Bila hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia, sedangkan manusia merupakan

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002, hlm. 70

elemen yang menjalankan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa negara terselenggara dengan adanya hukum. Penerapan atau implementasi hukum memiliki tujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Dalam bidang ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- a) Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.

Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha⁵.

4. Hak-hak dasar tenaga kerja

Hak adalah Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Menurut van Apeldoorn (dalam bukunya “ Inleiding tot de studie van het nederlanse recht ”) hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Hak terbagi dua yaitu:

- a. Hak mutlak : ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan wajib saling menghormati hak tersebut. (HAM, Hak publik mutlak, Hak Keperdataan)
- b. Hak Nisbi : Hak relatif yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu agar orang ikut perintah.

Hak dasar tenaga kerja yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN dibagi kedalam 9 bagian, yaitu:

- 1) Bekerja di luar negeri;
- 2) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;

⁵ Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 9

- 3) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- 4) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- 5) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- 6) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di negara tujuan;
- 7) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-perundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- 8) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- 9) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Namun hak-hak dasar yang diatur dalam undang-undang ini sebenarnya tidak tertuang secara detil bila dibandingkan dengan hak-hak yang dijelaskan dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya. Dalam konvensi internasional ini bukan hanya hak-hak dasar dari buruh migran yang menjadi perhatian, namun ada tambahan yaitu keluarganya. Jadi pemenuhan hak-hak dasar buruh migran ini juga menyangkut pautkan keluarga buruh migran tersebut, sehingga selain hak untuk mendapat pekerjaan, penghasilan yang layak serta perlakuan yang manusiawi sekalipun buruh migran ini bekerja bukan di negaranya sendiri, keluarga dari buruh migran ini juga harus dipertimbangkan hak-haknya dan juga harus ikut dipenuhi.

Penjelasan hak yang ada dalam undang-undang PPTKILN pasal 8 memang tidak menyebutkan bahwa keluarga dari buruh migran ini harus diperhitungkan juga pemenuhan hak-haknya, namun dalam pasal 3 huruf (c)

disebutkan bahwa penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini tampaknya yang menjadi konsentrasi untuk diberikan perlindungan hak-haknya hanya pada tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri saja dan berpikiran bahwa apabila TKI tersebut sejahtera, maka efek yang sama akan terjadi kepada pihak keluarganya yaitu keluarganya juga akan sejahtera.

5. Ganti rugi kecelakaan kerja

Didalam hukum perdata, adanya ganti rugi ini disebabkan karena adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang sepakat akan sesuatu hal. Kemudian apabila salah satu pihak atau lebih tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan atau terjadi wanprestasi, maka akan ada pihak yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Ketika itulah akan ada permintaan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan tadi. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi.

Pengertian mengenai ganti rugi sebenarnya tidak selalu mengenai barang atau uang yang menjadi wujud dari hasil ganti rugi. Apabila ganti rugi ini menyangkut permasalahan nyawa atau kondisi fisik seseorang maka juga bisa dikatakan ganti rugi. Asset tubuh manusia apabila dilanggar bisa juga menimbulkan akibat permintaan ganti rugi, misalnya saja pada saat terjadi kecelakaan kerja.

Definisi kecelakaan kerja menurut ahli adalah sebagai berikut:

- a. Heinrich (1980) mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi yang memungkinkan/dapat menyebabkan *injury*.
- b. *International labour office* (1989), kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol, yang disebabkan oleh manusia, situasi/faktor lingkungan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja, yang dapat (ataupun tidak) menimbulkan

injury, kesakitan, kematian, kerusakan property, atau kejadian yang tidak diinginkan.

V. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 77 ayat (2) yang dimaksud untuk memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai pada masa purna penempatan. Perlindungan yang diberikan pada masa pra penempatan secara umum adalah dengan cara memberikan bekal dan persiapan yang matang bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai tujuan negara mereka bekerja. Ketika mereka sudah berada di Malaysia maka mereka akan dilindungi dengan Pasal 80 undang-undang PPTKILN yang menjelaskan bahwa mereka akan diberikan bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, dengan demikian perlindungan hukum pada Tenaga Kerja Indonesia akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan di negara tempat mereka bekerja, sedangkan Kedutaan Besar Indonesia atau Konsulat yang ada di Malaysia melaksanakan pengawasan pelaksanaan perlindungan tersebut.

Setelah sampai di Malaysia, maka Tenaga Kerja Indonesia tersebut akan ditempatkan kepada majikan tempat mereka bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disetujui, dengan memiliki “permit kerja” yang merupakan tanda bahwa tenaga kerja asing dinyatakan legal untuk bekerja di Malaysia, maka Tenaga Kerja Indonesia sudah bisa mulai bekerja sebagai kewajibannya sebagai pekerja dan mendapatkan upah sebagai haknya. Di samping upah sebagai hak Tenaga Kerja Indonesia, ada hal lain yang merupakan hak Tenaga Kerja Indonesia yang sama pentingnya dengan upah yaitu hak atas keselamatan kerja. Maksudnya, dalam melaksanakan suatu pekerjaan, setiap pekerja pasti menghadapi risiko. Risiko tersebut adalah kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan karena kelalaian ataupun faktor lainnya. Apabila hal ini menimpa seorang Tenaga Kerja Indonesia, maka harus ada ganti rugi kecelakaan kerja terhadapnya.

Pemerintah Malaysia mengatur persoalan ini di dalam *Employment Act 1955* yang menjelaskan bahwa majikan harus membayarkan asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia apabila terjadi kecelakaan kerja. maka yang bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian tersebut adalah majikannya (*Section 26 (2) of the Amended Workmen's Compensation Act 1952*). Peraturan ini menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada bentuk perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia, namun yang terjadi adalah masih banyak praktek pelanggaran terhadap peraturan ini dengan berbagai alasan. Sedangkan Pemerintah Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tergantung peraturan negara di mana Tenaga Kerja Indonesia bekerja, dalam hal ini di Malaysia. Dalam Pasal 80 dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia ketika berada di luar negeri dengan (a) diberikan bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, kemudian dalam penjelasan berikutnya yaitu pada huruf (b) pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara Tenaga Kerja Indonesia ditempatkan,

bentuk perlindungan yang dimaksudkan tidak disebutkan seperti apa, sehingga tidak dapat dijelaskan lebih lanjut tujuan yang dimaksud undang-undang ini.

Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke Malaysia hingga tahun 2012 berjumlah 1,9 juta orang dan jumlah yang ilegal mungkin hampir sama banyaknya⁶.

Berdasarkan keterangan yang mengatakan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia yang ilegal jumlahnya hampir sama dengan yang legal (hasil wawancara dengan staf di Disnakertrans Kabupaten Malang pada tanggal 25 Januari 2013), maka jelas bahwa akan banyak persoalan tidak dapat dipenuhinya terhadap hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja karena mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah.

Pelaksanaan perlindungan hukum atas ganti rugi kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia dengan cara membayarkan asuransi dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila Tenaga Kerja Indonesia tersebut mengalami kecelakaan kerja, sebagian majikan sebagai pengguna jasa tenaga kerja sudah melaksanakannya karena ada konsekuensi tertentu bagi yang melanggarnya dari Pemerintah Malaysia sendiri, tentunya hal ini berlaku bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berdokumen lengkap, sedangkan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap atau ilegal dan mendapatkan pekerjaan di Malaysia sebagai pekerja konstruksi, kebanyakan majikan tidak mau menanggung akibat apabila pekerja ini mengalami kecelakaan kerja atau mungkin terkena razia polisi setempat, karena majikanpun tidak mau rugi.⁷

Selain tidak berdokumen, Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia bagi yang legal maupun ilegal akan mendapatkan perlakuan yang sama apabila tertangkap pada saat ada razia, sehingga punya dokumen atau tidak punya dokumen akan tetap sama-sama ditangkap, bedanya Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki dokumen akan diambil lagi oleh majikannya, namun bagi

⁶ <http://finance.detik.com> .read 2012/09/26/170223/2038424/4 tenaga-kerja-indonesia-paling-banyak-tersebar-di-Malaysia, diakses pada tanggal 4 April 2013

⁷ hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin Direktur Utama PT Sinar Harapan Anda di Surabaya pada tanggal 2 Februari 2013.

Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen maka majikan tidak akan mau mengurus kebebasannya dan bahkan tidak mengakui bahwa pekerja tersebut bekerja pada majikan itu⁸ dengan alasan para majikan tersebut tidak ingin terkena sanksi dari pemerintah Malaysia karena mempekerjakan TKI ilegal.

Sistem perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia sangat berhubungan erat dengan mekanisme atau prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan melibatkan instansi terkait. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa keberhasilan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sangat ditentukan oleh sistem perlindungan yang dijalankan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik di negara Indonesia maupun di negara penempatan.

Selain itu, bahwa sistem perlindungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia juga bersifat koordinatif, yaitu dijalankan dengan melibatkan instansi terkait. Oleh karena itu, proses penyelesaian permasalahan tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi relatif memakan waktu karena tidak menutup kemungkinan memerlukan konfirmasi pihak-pihak lain seperti perwakilan Republik Indonesia (Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia), agency di luar negeri atau majikan serta instansi teknis di luar negeri (misalnya Kepolisian, rumah sakit dan lain-lain).⁹ Kondisi seperti ini yang seringkali menjadikan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia merasa bahwa mereka tidak diberikan perlindungan secara hukum terutama apabila salah satu dari mereka mengalami kecelakaan kerja.

Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki dokumen lengkap yang kemudian mengalami kecelakaan kerja, maka penanganannya akan lebih diprioritaskan dan menjadi lebih mudah bagi majikan untuk mengklaim ganti ruginya dan apabila kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan kematian yang

⁸ hasil wawancara dengan Telo, mantan pekerja konstruksi di Malaysia, Dusun Bumirejo RT. 03 RW. 15 Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, tanggal 27 Januari 2013

⁹ <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/berita/arsip-berita/138-sistem-perlindungan-calon-tki-tki>, diakses pada tanggal 4 April 2013.

kemudian harus dipulangkan ke kampung halaman Tenaga Kerja Indonesia tersebut, maka pihak Perwakilan Indonesia di Malaysia akan lebih mudah juga untuk mengurusnya, akan tetapi bila Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen, maka yang terjadi adalah mereka harus berusaha dengan tenaga mereka sendiri dan bantuan dari rekan sesama Tenaga Kerja Indonesia. Bila Tenaga Kerja Indonesia tidak berdokumen mengalami kecelakaan kerja sehingga mengalami luka sementara atau permanen atau bahkan kematian, harapan dari Tenaga Kerja Indonesia tersebut adalah rekan sesama Tenaga Kerja Indonesianya, dengan cara gotong royong untuk menggalang dana bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja tersebut baru dapat diobati, sedangkan tanggung jawab perusahaan tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja sangat tergantung dari sifat atau pribadi “baik” dan “tidak baik” dari majikan tersebut. Jika majikannya “baik” maka majikan tersebut setidaknya akan ikut memberikan santunan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja, namun jika sebaliknya majikannya “tidak baik”, maka majikan ini akan lepas tanggung jawab.¹⁰

2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Malang yang menjadi pekerja konstruksi di Malaysia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Dipulangkannya Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia disebabkan oleh banyak faktor, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 73 disebutkan “(1) kepulangan TKI terjadi karena: (a) berakhirnya masa perjanjian; (b) pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; (c) terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; (d) mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi; (e) meninggal dunia di negara tujuan; (f) cuti; atau (g) dideportasi oleh pemerintah setempat.

¹⁰ hasil wawancara dengan Ngateman mantan pekerja konstruksi asal Blitar namun berangkat melalui agen dari Kabupaten Malang, Dusun Dawung RT. 02 RW. 04, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, tanggal 2 Maret 2013.

Dalam hal Tenaga Kerja Indonesia harus dipulangkan karena mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bisa bekerja lagi, maka harus ada kompensasi tersendiri bagi Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Untuk hal ini Pemerintah Malaysia mengatur dalam *Malaysian Labor Law Employment Act 1955* pada bagian kompensasi atau ganti rugi bagi tenaga kerja asing yang mengalami kecelakaan kerja. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas tenaga kerja asing yang mengalami kecelakaan kerja adalah majikan atau pengguna jasa tenaga kerja asing itu sendiri dengan cara mengikutkan tenaga kerja asing itu ke dalam asuransi keselamatan kerja dan membayarkan iuran asuransi tersebut.

Dalam prakteknya, Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang ilegal jumlahnya sama banyaknya dengan TKI yang legal atau berdokumen, namun mereka menuntut hal yang sama dalam hal hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. Untuk Tenaga Kerja Indonesia yang berdokumen, penuntutan hak dapat dipenuhi oleh majikan karena Tenaga Kerja Indonesia tersebut memiliki dasar hukum yang kuat untuk bisa meminta haknya untuk dipenuhi, sedangkan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen penuntutan hak adalah hal yang kondisional.

Keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dari Kabupaten Malang untuk menjadi pekerja konstruksi cukup diminati, dibuktikan dengan jumlah kurang lebih 450 orang yang berangkat menjadi pekerja konstruksi di Malaysia dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2012.¹¹ Namun jumlah tersebut adalah Tenaga Kerja Indonesia yang keberangkatannya terdaftar, sedangkan jumlah yang tidak terdaftar tidak bisa diperkirakan berapa banyaknya. Dengan melihat banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang legal dan ilegal jumlahnya hampir sama, mungkin kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Malang.¹²

¹¹ Hasil studi dokumen dari dokumen tentang: "Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2009" – dikutip dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, halaman 11

¹² hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kantor Disnakertrans Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2013.

Dengan kondisi ekonomi yang sulit, seringkali menjadi motivasi calon Tenaga Kerja Indonesia untuk berangkat mencari nafkah di Malaysia. Karena alasan ekonomi maka kebanyakan calon Tenaga Kerja Indonesia lebih memilih jalur ilegal untuk berangkat dari pada jalur yang legal. Jalur legal memang membutuhkan biaya dan harus mengikuti alur prosedur yang sesuai dengan undang-undang dan lebih aman, namun hal ini tidak diindahkan oleh Tenaga Kerja Indonesia ilegal tersebut. Proses keberangkatan melalui jalur ilegal jauh lebih mudah dan murah namun beresiko.¹³

Resiko ini diambil oleh para Tenaga Kerja Indonesia tersebut dengan pikiran bahwa ketika sampai di Malaysia mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Memang benar adanya, ketika mereka sampai di Malaysia dan memiliki “permit kerja” maka mereka berhak untuk dipekerjakan dalam suatu proyek konstruksi dan mendapatkan upah. Seringkali majikan atau pengguna jasa tenaga kerja tidak terlalu memusingkan status Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal maupun legal; meskipun sebagian majikan mau menerima Tenaga Kerja Indonesia ilegal; karena dengan mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal majikan tidak akan repot mengurus permasalahan jaminan keselamatan kerja dari Tenaga Kerja Indonesia tersebut sedangkan yang mempekerjakan TKI legal harus mendaftarkan pekerjanya kepada perusahaan asuransi terpilih.¹⁴

2.1 Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja Tenaga Kerja Indonesia pekerja konstruksi di Malaysia

Pemerintah Kabupaten Malang “merasa” sudah berupaya keras untuk selalu membantu Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah dan menjalankan tugas mereka sebagaimana seharusnya, namun opini dari satu pihak ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa suatu hal sudah membaik karena ada pernyataan yang menyatakan seperti itu, perlu adanya

¹³ hasil wawancara dengan Ngateman; tanggal 2 Maret 2013.

¹⁴ hasil wawancara dengan Ngateman; pada tanggal 2 Maret 2013.

pembuktian yang nyata bahwa permasalahan tersebut sudah bisa teratasi dengan baik. Sosialisasi sudah dilakukan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah untuk bagaimana prosedur yang benar untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia, namun masih sangat banyak calon Tenaga Kerja Indonesia yang lebih memilih jalur gelap untuk bisa sampai ke negara tujuan untuk bekerja, hal ini yang menjadi permasalahan yang sulit dijangkau oleh pemerintah sehingga pemerintah hanya bisa memberikan simpatinya saja kepada korban.¹⁵

Selain itu banyak Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat bukan melalui pemerintah Kabupaten Malang atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Kabupaten Malang, namun dari Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta kota atau daerah lain. Hal ini sangat menyulitkan apabila ada Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian karena Tenaga Kerja Indonesia tersebut nantinya akan diarahkan ke Pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan pemerintah tidak memiliki informasi atau data mengenai Tenaga Kerja Indonesia tersebut, sehingga penanganan akan sulit atau bahkan tidak bisa dilanjutkan.

2.2 Upaya mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja Tenaga Kerja Indonesia pekerja konstruksi di Malaysia

Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan upaya-upaya agar calon TKI yang akan diberangkatkan lebih memilih jalur legal dan sesuai dengan undang-undang, mengapa? Karena cara ini adalah cara teraman dan merupakan salah satu cara agar ketika TKI berada di negara tujuan tidak mendapatkan permasalahan terkait dokumen-dokumen pribadi. Proses mulai masa perekrutan hingga penempatan memang diakui pihak pemerintah cukup memakan waktu, namun biaya tidak. Maksudnya, paradigma berpikir masyarakat yang menilai apabila menjadi TKI melalui

¹⁵ <http://www.kampungtki.com/baca/12345> diakses pada tanggal 19 Maret 2013.

jalur pemerintah adalah mahal karena adanya calo adalah salah, karena pihak Pemerintah Kabupaten Malang sudah membersihkan budaya calo dan memandang sama rata setiap calon TKI yang akan diberangkatkan.

Dalam menegakan hukum untuk meberikan perlindungan secara hukum kepada calon TKI, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk tim pengawas yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan calon TKI yang melalui pemerintah maupun melalui jasa penyalur tenaga kerja agar tidak ada penyelewengan dokumen atau pemalsuan dokumen.¹⁶ Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang juga memiliki program tahunan yang berupa melakukan kunjungan kepada TKI-TKI yang sudah pulang ke kampung halamannya atau memberikan santunan berupa uang atau sembako sebagai model pendekatan dalam menyampaikan sistem bagi pekerja yang ingin menjadi TKI yang sesuai dengan undang-undang dan resiko-resiko yang akan dihadapi di negara tujuan kerja apabila tidak mentaati undang-undang tersebut.

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang juga berbenah diri dengan melakukan peninjauan-peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan daerah terkait pelaksanaan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia. Bentuk upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang lebih kepada tindakan yang bersifat preventif karena disadari ketika TKI sedang menjalani masa penempatan di negara tujuan, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak untuk melakukan upaya perlindungan. Dengan bekerjasama dengan PJTKI-PJTKI swasta yang ada di daerah Kabupaten Malang, pemerintah berupaya untuk membuat TKI yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan hak-hak mereka, dengan demikian persentase TKI tersebut terkena masalah akan menjadi lebih kecil. Namun

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Djaka, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2013.

demikian, upaya-upaya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang tentu saja bisa dimentahkan atau tidak tercapai tujuannya apabila calon TKI atau TKI tersebut tidak mau bekerjasama.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja bagi TKI yang bekerja menjadi pekerja konstruksi di Malaysia masih belum dilaksanakan secara optimal karena dari 2 (orang) yang mengalami kecelakaan kerja dan 5 (lima) orang yang merupakan informan kunci yang memiliki teman pernah mengalami kecelakaan kerja hanya 2 pekerja yang terpenuhi haknya atas ganti rugi kecelakaan kerja. Menurut informasi dari TKI yang pernah mengalami kecelakaan kerja hal itu tergantung dari “pribadi” pengusaha konstruksinya atau majikan TKI tersebut, kalau mereka “baik” maka pemenuhan ganti rugi dilaksanakan dengan membayarkan asuransi atau biaya pengobatan dan sebaliknya bila “tidak baik” maka tidak akan ada pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja.
- b. Kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja bagi TKI yang bekerja menjadi pekerja konstruksi di Malaysia adalah banyaknya calon TKI yang lebih memilih untuk berangkat ke Malaysia secara ilegal sehingga mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang jelas untuk menjadi TKI yang pada akhirnya mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya hak ganti rugi mereka apabila mereka mengalami kecelakaan kerja.
- c. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah dengan lebih ketat dalam melaksanakan seleksi perekrutan calon TKI dan memberikan pembekalan secara matang agar TKI memiliki kepercayaan diri

dalam membela haknya sebagai pekerja. Bagi TKI upaya yang dilakukan adalah dengan berusaha untuk mentaati peraturan undang-undang yang sudah ada dan mencerdaskan diri dalam mengetahui hak-hak mereka secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Saran

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang perlu menjalin kerja sama yang lebih baik lagi kepada PPTKIS yang ada di daerah Kabupaten Malang tanpa memandang bulu dalam rangka melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar lebih memilih jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia di setiap sektor dari bidang yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Malang.
- b. Bagi Masyarakat dengan adanya tulisan ini diharapkan bisa menyadari apa saja hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dan memiliki landasan hukum untuk menuntut hak-hak mereka agar mendapatkan perlakuan yang benar dari pihak terkait.
- c. Bagi Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap TKI secara keseluruhan khususnya pekerja konstruksi dalam memenuhi hak-hak pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional serta kebiasaan-kebiasaan internasional dan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia dalam menegakkan hukum secara adil dan berimbang dan tidak memihak.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2009.
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992.
- Erman Suparno, *National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional)*, Sebuah Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif Global, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, diterbitkan PT. Refika Aditama, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan, *RUU Ketenagakerjaan: Pantas Meresahkan Buruh*, Cetakan Pertama, 1997.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Priyono Tjiptoherijanto, *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*, UI-Press, 1997.

Rachmad Syafa'at, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*, In-Trans Publishing, 2008.

Internet:

<http://finance.detik.com/read/2012/09/26/170223/2038424/4/tenaga-kerja-indonesia-paling-banyak-tersebar-di-malaysia> pada tanggal 1 November 2012

www.jpnn.com, Upah Terendah TKI di Malaysia Rp.2,1 juta. Diakses pada tanggal 17 November 2012

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/berita/arsip-berita/138-sistem-perlindungan-calon-tki-tki>, diakses pada tanggal 4 April 2013

<http://www.kampungtki.com/baca/12345> diakses pada tanggal 19 Maret 2013